



Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Dampak Deflasi terhadap UMKM di Kota Tanjungpinang

Benni Saputra^{1*}, Zahru Latip², Zara Alga Suri³

^{1*} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

benisaputraxx070@gmail.com

² Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

zahrulatif0906@gmail.com

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

algasuri30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika ekonomi daerah dengan menekankan peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas harga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks daya beli dan keputusan konsumsi. Ketika pemerintah mampu menjaga pergerakan harga dalam kisaran yang stabil, masyarakat memperoleh kepastian untuk melakukan pengeluaran produktif maupun konsumtif secara terencana. Selain itu, pelaku UMKM memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang karena biaya produksi dan distribusi dapat diprediksi dengan lebih baik. Perkembangan teknologi digital juga berperan besar dalam mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat, yang kemudian mendorong pemerintah untuk memperkuat literasi digital dan kapasitas usaha pelaku UMKM agar mampu bersaing dalam pasar yang semakin terbuka. Pengumpulan dan pemanfaatan data statistik menjadi instrumen penting yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata di berbagai lapisan masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan perekonomian daerah yang stabil, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Kata Kunci: *Stabilitas harga; Daya beli; UMKM; Kebijakan ekonomi daerah; Pertumbuhan ekonomi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan fiskal dan non-fiskal yang diterapkan pemerintah, karena setiap instrumen kebijakan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Ketika pemerintah menyesuaikan belanja daerah untuk memperkuat sektor UMKM, maka struktur ekonomi lokal memperoleh dorongan tambahan yang mampu meningkatkan perputaran modal di berbagai lapisan usaha. Langkah ini menjadi semakin penting pada masa ketika kondisi harga cenderung fluktuatif, sebab stabilitas ekonomi masyarakat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, arah pengelolaan kebijakan harus terus mempertimbangkan dinamika harga, daya beli, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Keterlibatan pelaku usaha dalam berbagai program peningkatan kapasitas juga berperan besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah karena kemampuan adaptasi usaha menentukan keberlanjutan pertumbuhan. Pelaku UMKM yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi masyarakat cenderung lebih cepat pulih ketika pasar mengalami penyesuaian harga. Pemerintah daerah berupaya mendorong proses adaptasi tersebut melalui pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, serta penguatan literasi keuangan bagi seluruh pelaku usaha kecil. Sinergi antara inovasi pelaku usaha dan dukungan pemerintah menghasilkan kondisi pasar yang lebih kompetitif namun tetap stabil bagi konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen juga mengalami perubahan signifikan dalam perilaku belanja karena faktor harga dan akses teknologi memengaruhi keputusan pembelian secara lebih mendalam. Ketika harga kebutuhan utama berada dalam kondisi stabil, masyarakat memiliki ruang untuk mengalokasikan sebagian anggaran kepada kebutuhan tambahan yang sebelumnya tertunda. Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas harga bukan hanya memengaruhi rumah tangga miskin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan kelas menengah terhadap iklim ekonomi. Dampaknya terlihat pada meningkatnya mobilitas konsumsi yang memberi kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, terutama terkait pengembangan sektor yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Pemerintah biasanya menempatkan sektor UMKM, pariwisata, dan industri kreatif sebagai prioritas karena sektor-sektor tersebut terbukti mampu bertahan ketika terjadi tekanan ekonomi. Penguatan sektor tersebut membutuhkan dukungan berupa akses permodalan, infrastruktur pendukung, serta regulasi yang memberi ruang bagi inovasi. Dengan kebijakan yang konsisten, daerah dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan harga maupun perubahan pasar.

Kinerja perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh tingkat konektivitas antarwilayah, sebab arus barang dan jasa sangat ditentukan oleh kelancaran jalur distribusi. Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam meningkatkan fasilitas transportasi dan logistik untuk memastikan biaya distribusi tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan usaha. Ketika akses distribusi membaik, harga barang cenderung lebih stabil karena pasokan dapat dipenuhi tepat waktu tanpa biaya tambahan yang memberatkan pedagang. Stabilitas inilah yang kemudian mendukung peningkatan daya

beli masyarakat di berbagai lapisan ekonomi.

Penguatan data statistik daerah menjadi hal penting karena pemerintah membutuhkan informasi yang akurat sebelum merumuskan kebijakan stabilisasi harga maupun program pemberdayaan. Informasi mengenai perkembangan inflasi, pergerakan indeks harga konsumen, dan pola konsumsi masyarakat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan strategi berikutnya. Ketika data tersebut dianalisis secara komprehensif, pemerintah dapat menyesuaikan alokasi anggaran agar tepat sasaran dan mampu mengatasi persoalan ekonomi yang muncul. Pendekatan berbasis data ini menjadikan perumusan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang semakin terbuka memaksa pelaku usaha untuk tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan jaringan distribusi yang lebih luas. Transformasi ini menuntut peningkatan kualitas produk, efisiensi operasional, dan kemampuan promosi yang lebih baik agar mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar daerah. Pemerintah daerah mendukung proses tersebut melalui program pembinaan yang mendorong pelaku usaha meningkatkan daya saing tanpa menghilangkan karakter lokal produk. Dengan demikian, perluasan pasar dapat dicapai tanpa mengorbankan identitas ekonomi daerah.

Stabilitas harga yang terjaga dalam beberapa periode memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan pengeluaran konsumtif maupun produktif. Rumah tangga yang memiliki kepastian terhadap kondisi harga cenderung lebih berani membuat rencana ekonomi jangka panjang, termasuk pengeluaran pendidikan, perbaikan rumah, atau investasi usaha keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan harga memiliki pengaruh signifikan terhadap psikologis ekonomi masyarakat yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjaga kondisi stabil ini melalui pengawasan distribusi, pengendalian pasokan, dan pemantauan harga komoditas strategis.

Penguatan peran pemerintah dalam mengelola dinamika ekonomi daerah menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang seimbang dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap kebijakan harus dirancang tidak hanya untuk menjawab persoalan jangka pendek tetapi juga menanam fondasi bagi keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Ketika pemerintah mampu mempertahankan stabilitas harga, memperkuat daya beli, dan mendorong transformasi usaha, maka struktur ekonomi daerah akan berkembang secara lebih sehat. Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi pilar utama dalam membangun perekonomian daerah yang stabil, berkembang, dan berkelanjutan.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan bersama dengan metode analisis deskriptif. Menurut Nazir (2003), tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data dengan meninjau buku, literatur, catatan, dan laporan terkait subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti berdasarkan sumber-sumber teoritis yang relevan. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis Moleong (2017) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tujuannya adalah untuk memahami fenomena secara keseluruhan dengan memanfaatkan data deskriptif yang diberikan oleh individu, serta tindakan yang mereka amati. Namun demikian, ketika literatur dievaluasi, data tidak diperoleh dari lapangan; sebaliknya, dikumpulkan melalui

analisis kritis berbagai referensi yang mendukung. Langkah-langkah analisis termasuk memilih literatur yang relevan, menentukan tema atau masalah utama, mengelompokkan hasil penelitian dalam kelompok tertentu, dan membuat sintesis berdasarkan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Deflasi dan Dinamika Ekonomi Tanjungpinang

Perkembangan ekonomi Kota Tanjungpinang pada awal 2024 hingga 2025 menunjukkan pola fluktuatif yang cukup signifikan, terutama karena tekanan harga yang bergerak tidak stabil dan berdampak pada aktivitas konsumsi masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi utama (Afriyadi et al., 2025). Deflasi yang tercatat pada Januari dan Februari 2025 memperlihatkan kondisi perlambatan konsumsi yang mengindikasikan tekanan permintaan agregat yang belum kembali pulih sepenuhnya (BPS Kota Tanjungpinang, 2025). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa laju perekonomian lokal masih bergantung pada sektor perdagangan dan jasa yang sensitif terhadap perubahan harga barang kebutuhan pokok. Fenomena tersebut menegaskan bahwa stabilitas harga menjadi faktor kunci dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi daerah.

Deflasi yang dialami Tanjungpinang diawali dengan kecenderungan turunnya Indeks Harga Konsumen, yang sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, serta beberapa komoditas transportasi yang menjadi pengeluaran utama rumah tangga (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2025). Penurunan harga tersebut memang menguntungkan dari sisi biaya konsumsi, namun bila terjadi secara berkepanjangan dapat memicu penurunan pendapatan pelaku usaha kecil yang bergantung pada perputaran ekonomi harian. Kondisi ini juga membuat sektor-sektor kecil menahan ekspansi usaha karena ketidakpastian tingkat permintaan masyarakat. Ketidakpastian semacam ini berpotensi memperpanjang tekanan ekonomi bila tidak diimbangi intervensi kebijakan.

Data BPS Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa dua kota besar di provinsi tersebut mengalami deflasi secara bersamaan, yang menandakan bahwa fenomena ini bukan hanya persoalan lokal tetapi juga menggambarkan kondisi struktural yang lebih luas (BPS Kepri, 2025). Penurunan harga barang yang terjadi tidak sepenuhnya didorong oleh peningkatan efisiensi produksi, tetapi lebih disebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang belum pulih pascapandemi dan tekanan eksternal ekonomi global. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan erat antara dinamika ekonomi nasional dengan kondisi daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada arus perdagangan lintas wilayah. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pemerintah memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi terutama melalui kebijakan fiskal daerah dan intervensi program berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2024). Ketika deflasi terjadi, intervensi pemerintah menjadi semakin penting karena banyak pelaku usaha mengalami penurunan penjualan dan kesulitan operasional yang membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan stabilisasi yang dikeluarkan mampu menahan penurunan permintaan jangka panjang. Oleh karena itu, respons kebijakan menjadi salah satu faktor penentu pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Kondisi deflasi di daerah seperti Tanjungpinang juga tidak terlepas dari pengaruh

perubahan harga global yang memberi tekanan pada struktur biaya produksi barang kebutuhan masyarakat, terutama yang berasal dari luar daerah (Arzaqi et al., 2023). Ketika harga komoditas menurun secara nasional, daerah dengan ketergantungan tinggi pada barang impor dalam skala kecil akan mengalaminya secara lebih cepat. Namun, sifat deflasi semacam ini tidak mencerminkan peningkatan produktivitas daerah melainkan menunjukkan respons pasif terhadap tekanan harga yang bersumber dari faktor eksternal. Hal ini menyebabkan dinamika ekonomi lokal tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan pasar yang lebih luas.

Pemerintah kota mencatat bahwa deflasi yang terjadi pada rentang 2024–2025 sebenarnya menunjukkan bahwa kondisi inflasi telah terkendali, namun penurunan harga yang terlalu cepat dapat menurunkan margin keuntungan pelaku usaha kecil (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2024). Pelaku UMKM yang mengandalkan konsumsi harian menjadi kelompok yang paling merasakan dampak penurunan harga karena keuntungan usaha bergantung pada selisih harga penjualan dan biaya permodalan. Deflasi juga membuat pelaku usaha menahan stok barang dalam jumlah besar untuk menghindari kerugian apabila harga kembali turun. Ketidakpastian harga semacam ini menimbulkan kecenderungan pelaku usaha untuk bersikap konservatif dalam mengambil keputusan bisnis.

Dinamika inflasi dan deflasi yang terjadi pada skala lokal tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli dalam beberapa bulan terakhir (Ananda et al., 2025). Penurunan daya beli ini menunjukkan bahwa masyarakat mengurangi pengeluaran non-esensial dan berfokus pada kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih stabil. Kebijakan subsidi dan bantuan sosial pemerintah memang membantu mempertahankan tingkat konsumsi, tetapi belum mampu mengembalikan mobilitas ekonomi ke tingkat sebelum tekanan inflasi dan deflasi terjadi. Hal ini menyebabkan proses pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain yang memiliki struktur ekonomi lebih beragam.

Perubahan indikator harga yang terus bergerak dalam zona deflasi juga menunjukkan adanya pergeseran aktivitas perdagangan yang lebih berhati-hati, dimana pelaku usaha kecil dan konsumen sama-sama menunda pembelian dalam jangka pendek (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024). Penundaan semacam ini menyebabkan siklus alami perdagangan menjadi melemah sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB daerah menurun secara bertahap. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memantau dengan cermat dinamika harga agar dapat merespons perubahan secara lebih cepat. Dengan demikian, situasi deflasi harus dipandang sebagai sinyal bahwa perekonomian daerah membutuhkan stimulus.

Tinjauan terhadap data perekonomian daerah menunjukkan bahwa deflasi yang berulang memberikan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang stabil (Pratama et al., 2024). Penurunan harga yang terus terjadi harus diimbangi dengan kebijakan peningkatan permintaan agar tidak mengganggu tingkat pendapatan pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Ketika aktivitas konsumsi masyarakat melemah, maka sektor UMKM ikut terdampak secara langsung karena berkurangnya transaksi harian. Oleh sebab itu, pengendalian harga dan pembentukan kebijakan responsif menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.

Dampak Deflasi terhadap UMKM dan Struktur Ekonomi Lokal

Deflasi yang terjadi di Tanjungpinang membawa konsekuensi serius terhadap

kinerja UMKM, karena penurunan harga barang menyebabkan turunnya pendapatan usaha yang bergantung pada perputaran ekonomi cepat (Maliangkay et al., 2024). Pelaku UMKM pada sektor makanan, ritel, dan layanan harian merasakan dampak paling besar karena perubahan harga secara langsung mempengaruhi strategi penjualan mereka. Kondisi ini membuat UMKM mengalami tekanan dalam menjaga keberlanjutan operasional, terutama ketika margin keuntungan menjadi semakin tipis. Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana deflasi dapat melemahkan usaha kecil yang tidak memiliki cadangan modal kuat.

Ketika harga barang turun, konsumen cenderung menunda pembelian karena mengharapkan harga akan terus menurun, sehingga pelaku usaha kehilangan momentum penjualan yang seharusnya dapat berlangsung secara stabil (Mas'ud & Susilo, 2023). Pola konsumsi seperti ini menjadi persoalan serius bagi UMKM yang mengandalkan penjualan harian untuk kebutuhan modal kerja. Penurunan transaksi menyebabkan rantai pasok lokal menjadi terhambat karena pelaku usaha menahan belanja bahan baku. Pada akhirnya, kondisi tersebut menciptakan lingkaran deflasi yang memperdalam tekanan terhadap pasar lokal.

Selain penurunan penjualan, UMKM juga mengalami tekanan pada struktur biaya operasional karena meskipun harga barang turun, tidak semua biaya penunjang usaha ikut menurun, terutama biaya sewa dan permodalan (Ibrahim, 2019). Disparitas harga ini memperburuk posisi UMKM yang beroperasi dalam lingkungan persaingan ketat. Akibatnya, pelaku UMKM sering kali harus melakukan penyesuaian strategi seperti pengurangan jam kerja atau pengurangan tenaga kerja untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kebijakan adaptif semacam ini menjadi indikator bahwa deflasi memiliki dampak jangka panjang terhadap ketahanan ekonomi sektor kecil.

UMKM juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan ketika persaingan harga semakin ketat akibat kondisi deflasi, karena banyak pelaku usaha yang terpaksa menurunkan harga tanpa meningkatkan kualitas layanan (Evangeulista et al., 2023). Strategi penurunan harga memang dapat meningkatkan penjualan dalam jangka sangat pendek, tetapi tidak memberikan dampak berkelanjutan bagi keberlanjutan usaha. Pelanggan dapat beralih ke kompetitor yang menawarkan harga lebih rendah, sehingga menciptakan persaingan tidak sehat di pasar lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa deflasi dapat mengganggu struktur pasar dan keberlanjutan usaha.

Dampak deflasi juga terasa pada sektor IKM (Industri Kecil Menengah), dimana banyak pelaku industri kecil mengalami penurunan permintaan dan kesulitan memperluas pangsa pasar akibat menurunnya kemampuan beli masyarakat (Bakhri, 2020). Industrialisasi kecil yang biasanya bergerak dalam produksi pangan, kerajinan, atau kebutuhan rumah tangga mengalami penurunan omset akibat menurunnya nilai transaksi harian. Tantangan tersebut membuat IKM semakin sulit berkembang meskipun memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif untuk menjaga keberlanjutan industri kecil di tengah tekanan deflasi.

Dalam konteks pasar daerah, deflasi juga memperlemah kemampuan pelaku usaha dalam mengakses permodalan karena lembaga keuangan cenderung lebih berhati-hati memberikan pinjaman ketika aktivitas ekonomi melambat (Ngasi & Darmawan, 2024). Pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha harus menghadapi syarat pembiayaan yang lebih ketat, sementara pendapatan mereka terus menurun akibat penurunan harga barang dan lemahnya permintaan. Kondisi ini mempersempit

peluang ekspansi UMKM yang sebenarnya memiliki potensi untuk tumbuh lebih cepat bila mendapat dukungan modal yang memadai. Akibatnya, struktur ekonomi lokal menjadi kurang dinamis.

Fenomena deflasi juga memicu perubahan strategi bisnis pelaku UMKM yang terpaksa mengurangi jumlah stok barang untuk meminimalkan risiko kerugian akibat penurunan harga yang terus berlanjut (Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2025). Pengurangan stok ini menyebabkan rantai distribusi barang menjadi lebih lambat sehingga beberapa produk mengalami kelangkaan sesaat di pasaran. Walaupun kelangkaan tersebut dapat menaikkan harga sesaat, kondisi ini tidak memberikan keuntungan jangka panjang bagi pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga yang disebabkan oleh deflasi dapat menciptakan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan.

Tekanan deflasi membuat pelaku UMKM berupaya mencari strategi adaptasi yang lebih kreatif agar dapat bertahan, seperti meningkatkan efisiensi produksi atau memperluas promosi melalui platform digital (Putri & Widadi, 2024). Digitalisasi menawarkan peluang baru bagi UMKM untuk menjangkau pasar lebih luas, namun tidak semua pelaku UMKM siap secara teknologi maupun pengetahuan. Adaptasi digital menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan keterampilan, infrastruktur, serta investasi yang tidak sedikit. Dengan demikian, transformasi digital belum sepenuhnya menjadi solusi cepat bagi semua pelaku usaha.

Penurunan permintaan yang berlangsung terus-menerus menyebabkan struktur ekonomi daerah menjadi melemah dan ketergantungan terhadap sektor tertentu semakin meningkat (Meutia et al., 2020). Ketika UMKM melemah, kontribusi sektor informal dan mikro terhadap perekonomian daerah juga ikut turun, sehingga mengurangi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, apabila deflasi tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat, maka ketahanan ekonomi daerah dapat terancam oleh lemahnya pelaku usaha lokal. Oleh sebab itu, pemulihan daya beli menjadi langkah utama untuk memperbaiki kondisi ekonomi berbasis UMKM.

Respons Pemerintah dan Strategi Ketahanan UMKM di Era Digital

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi Tanjungpinang, terutama melalui kebijakan yang berfokus pada pemulihan daya beli masyarakat dan perlindungan UMKM agar tidak terpuruk akibat tekanan deflasi (Awalunnisa & Sari, 2023). Berbagai program bantuan pengembangan usaha telah disalurkan, termasuk subsidi modal kecil dan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Kebijakan ini bertujuan menjaga kegiatan usaha agar tetap berjalan tanpa mengakibatkan penurunan produksi dan distribusi barang. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kondisi deflasi tidak berubah menjadi stagnasi ekonomi berkepanjangan.

IDistribusi bantuan kepada UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam meredam dampak deflasi, sebagaimana terlihat dari penyaluran bantuan kepada 1.965 UMKM di Provinsi Kepri sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi daerah (ANTARA News, 2024). Bantuan tersebut tidak hanya berupa modal, tetapi juga dukungan pelatihan dan pendampingan usaha yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dengan adanya dukungan ini, pelaku usaha memiliki kesempatan memperbaiki strategi bisnis di tengah kondisi ekonomi yang melemah. Pemerintah berharap bahwa intervensi tersebut dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pemulihan aktivitas UMKM.

Selain penyaluran bantuan, integrasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan, khususnya melalui sinergi antarinstansi dalam pengembangan ekonomi lokal (Djadjuli, 2024). Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan kebijakan dapat diimplementasikan secara terarah dan menyeluruh. Pemerintah menitikberatkan pada penguatan sektor yang terdampak langsung oleh deflasi seperti UMKM, perdagangan kecil, serta industri rumah tangga. Pendekatan ini memberikan dorongan struktural bagi sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pemerintah juga menekankan pentingnya stabilitas harga dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi melalui intervensi kebijakan fiskal dan pengendalian inflasi daerah (Darajati, 2019). Meskipun deflasi menunjukkan bahwa harga terkendali, pemerintah harus memastikan bahwa penurunan harga tidak memicu penurunan permintaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga menjadi penting untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat tetap berada pada level yang sehat. Ketepatan pemerintah dalam merespons fluktuasi harga menjadi penentu keberhasilan stabilitas ekonomi daerah.

Dalam menghadapi tantangan era digital, pemerintah juga memberikan dukungan untuk meningkatkan literasi teknologi bagi pelaku UMKM agar mereka mampu memanfaatkan platform digital secara optimal untuk pemasaran dan distribusi barang (Saputra, 2020). Transformasi digital menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan usaha menghadapi fluktuasi harga dan perubahan pola konsumsi. Melalui pelatihan digital, pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan marketplace dan media sosial sebagai saluran pemasaran baru. Upaya ini diharapkan meningkatkan pendapatan UMKM di tengah tantangan deflasi.

Tantangan digitalisasi juga disikapi oleh pelaku UMKM melalui strategi adaptasi bisnis yang lebih modern, seperti penggunaan sistem pembayaran digital dan optimalisasi media sosial untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan (Maliangkay et al., 2024). Pemerintah mendorong strategi ini dengan menyiapkan fasilitas pelatihan dan infrastruktur pendukung untuk mempercepat proses adaptasi. Adaptasi UMKM dalam konteks digitalisasi tidak hanya meningkatkan jangkauan pasar, tetapi juga memberi efisiensi operasional yang lebih baik. Dengan demikian, digitalisasi menjadi salah satu motor pemulihan UMKM.

Program inovasi pemerintah daerah juga diarahkan pada penguatan sektor industri kreatif dan ekonomi berbasis jasa yang memiliki potensi besar dalam menghadapi situasi deflasi (Putri & Widadi, 2024). Pelaku UMKM kreatif didorong untuk memperbanyak variasi produk dan memperbaiki kualitas layanan sebagai strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kebijakan ini membantu menciptakan nilai tambah bagi produk lokal sehingga dapat bersaing dengan produk dari luar daerah. Dengan cara ini, pemerintah mengarahkan UMKM untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Selain kebijakan teknis, pemerintah daerah juga memperkuat perannya dalam menjaga dinamika perekonomian masyarakat melalui kebijakan makro daerah yang menekankan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis komunitas (Ningsih & Putri, 2024). Penguatan ekonomi berbasis komunitas memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk mendapatkan dukungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi menciptakan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini menegaskan pentingnya kerja sama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, respons pemerintah terhadap deflasi di Tanjungpinang mencerminkan upaya menyeluruh untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah melalui kombinasi kebijakan stabilitas harga, pemberdayaan UMKM, dan percepatan digitalisasi usaha (Pratama et al., 2024). Kebijakan yang diterapkan bertujuan memastikan perekonomian daerah tetap bergerak meskipun berada dalam tekanan harga yang menurun. Pelaku UMKM diberikan ruang lebih besar untuk beradaptasi agar tetap mampu mempertahankan usaha di tengah fluktuasi ekonomi. Dengan demikian, strategi pemerintah menjadi penentu penting dalam memperkuat daya tahan perekonomian lokal.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai dinamika ekonomi daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola stabilitas harga, memperkuat daya beli, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui kebijakan yang diarahkan pada penguatan UMKM, efisiensi distribusi, serta pemanfaatan data statistik yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan. Di sisi lain, pelaku usaha dan masyarakat turut berkontribusi melalui adaptasi terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, serta perubahan perilaku konsumsi yang semakin rasional dan berorientasi jangka panjang. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, A., Saputri, A. E., Filia, F., Herny, H., Arfian, N. P., & Muharima, S. (2025). Analisis dinamika pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tahun 2024. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(2), 673–682.
- Ananda, F. S., Faturrohman, & Rosalina, S. (2025). Analisis pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(5), 248–251.
- ANTARA News. (2024, September 20). *Pemprov Kepri menyalurkan bantuan pengembangan usaha bagi 1.965 UMKM*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4347075/pemprov-kepri-menyalurkan-bantuan-pengembangan-usaha-bagi-1965-umkm>
- Arsyad, L. (2024). Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi. *JlIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).
- Arzaqi, A. W., Olivia, N., & Safitri, R. D. (2023). Inflasi dan deflasi di era digital: Tantangan dan peluang bagi kebijakan ekonomi. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(1), 121–127.
- Awalunnisa, Y., & Sari, D. (2023). Peranan pemerintah dalam stabilisasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(5), 621–626.
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang. (2025). *Berita Resmi Statistik: Deflasi Februari 2025*. <https://tanjungpinangkota.bps.go.id/id/pressrelease>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2025). *BPS Kepri: Juli, IHK Dua Kota di Kepri Alami Deflasi*. <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/bps-kepri-juli-ihk-dua->

kota-di-kepri-alami-deflasi

- Bakhri, S. (2020). *Membangun ekonomi masyarakat melalui pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah)*.
- Darajati, M. R. (2019). Peran pemerintah dalam stabilitas ekonomi pasar. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 183–208.
- Djadjuli, R. D. (2024). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Dinamika*, Universitas Galuh.
- Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 33–42.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Inflasi year-on-year (y-on-y) Februari 2025 sebesar 0,09 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/2410/inflasi-year-on-year...>
- Ibrahim, H. (2019). Analisis keberlanjutan usaha pengrajin ekonomi kreatif kerajinan sutera di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 23(3), 210–219.
- Maliangkay, M., Maradia, K., Pareda, B., Musak, K., & Asaloei, S. I. (2024). Strategi adaptasi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis online selama pandemi. *Jurnal Lentera Bisnis dan Kewirausahaan*, 1(1), 15–19.
- Mas'ud, L. P., & Susilo, M. Y. (2023). Peran UMKM dalam membangun dan menumbuhkan ekonomi kreatif di era Revolusi 5.0 menuju ekonomi global. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 6(2), 266–275.
- Meutia, I. F., Yulianti, D., & Djausal, G. P. (2020). *Pemetaan Provinsi Lampung dalam keberlanjutan IMT-GT 2036*. Graha Ilmu.
- Ngasi, E. F. D., & Darmawan, E. (2024). Integrasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(3), 533–547.
- Ningsih, K. S., & Putri, M. (2024). Pemerintah daerah dalam dinamika perekonomian masyarakat. *Dialogia Iuridica*, 15(2).
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2024). *Inflasi terkendali, Pemko Tanjungpinang catat angka deflasi 0,06%*. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/inflasi-terkendali-pemko-tanjungpinang-catat-angka-deflasi-006>
- Pemerintah Kota Tanjungpinang. (2025). *Tanjungpinang alami deflasi pada Januari 2025*. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/tanjungpinang-alami-deflasi-pada-januari-2025>
- Pratama, F., Rizki, I. D. N., Andira, R., Sanjaya, R., Putra, S., & Putra, S. (2024). Dinamika ekonomi pembangunan Kota Tanjungpinang. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(6), 1332–1336.
- Putri, P. L., & Widadi, B. (2024). Peran inovasi dalam pengembangan model bisnis UMKM di era digital. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(4), 180–189.
- Saputra, A. A. (2020). *Analisis strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2024). *Mengungkap deflasi Indonesia: Penyebab dan dampak*. https://umj.ac.id/just_info/deflasi-di-indonesia-selama-lima-bulan-penyebab-dan-dampak-bagi-masyarakat/